

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Maraknya pertumbuhan media saat ini menjadikan isu gender semakin menarik. Publik sudah mulai mengakui keberadaan perempuan yang semakin maju dan mulai berani menunjukkan dirinya di era emansipasi wanita ini. Keadaan ini berbanding terbalik dengan jaman di mana perempuan belum mengenal emansipasi karena perempuan pada jaman itu belum bebas berekspresi.

Kebebasan berekspresi itu dapat dilihat dari bagaimana seorang wanita juga melakukan aktivitas yang ia inginkan, salah satunya melakukan kegiatan jurnalisme karena kegiatan ini dikatakan sebagai ranah kerja kaum pria. Jurnalisme adalah kegiatan menghimpun berita, mencari fakta dan melaporkan peristiwa (Kusumaningrat, 2012: 15). Kegiatan jurnalisme dilakukan oleh seorang wartawan di mana wartawan adalah orang yang menyebarkan informasi secara faktual, akurat, netral, seimbang dan adil, menyuarakan pihak-pihak yang lemah, kritis terhadap mereka yang berkuasa, skeptis, dan selalu menguji kebijakan yang dibuat penyelenggara kekuasaan,

memberikan pandangan, analisis, dan interpretasi terhadap masalah-masalah sosial (Mulyana, 2011: 498).

Berdasarkan pengertian di atas, dapat diketahui bahwa wartawan memiliki peran penting dalam menghasilkan sebuah pandangan melalui pemberitaannya. Akan tetapi pandangan-pandangan itu kemudian tidak begitu saja dituangkan dalam pemberitaannya tetapi pandangan itu ditentukan oleh kehidupan di mana media itu berada. Karena sifat dan faktanya bahwa tugas redaksional media massa adalah menceritakan peristiwa-peristiwa, maka dapat dikatakan bahwa seluruh isi media adalah realitas yang telah dikonstruksikan (Hariyanto, 2009: 167-183).

Media massa memang bukan satu-satunya faktor utama yang mempengaruhi cara pandang masyarakat karena media pada dasarnya hanya mencerminkan budaya masyarakat. Akan tetapi media punya peranan dalam isu-isu tentang gender karena intensitas masyarakat dalam mengonsumsi media massa tidak sedikit. Media massa bukan yang melahirkan ketidaksetaraan gender, tetapi media massa memperkuat, melestarikan, bahkan memperburuk segenap ketidakadilan terhadap perempuan dalam masyarakat (Hariyanto, 2009: 167-183).

Pada penelitian yang dilakukan oleh Pinastika Intar Ardani, ia menemukan bahwa Kompas melakukan stereotip gender pada pemberitaannya yaitu pembingkaihan terhadap legislator perempuan.

Marjinalisasi yang dialami oleh legislator perempuan pada pemberitaan Kompas dilakukan melalui prestasi dalam bidang politik. Ketika legislator perempuan ditampilkan dalam isu-isu politik, mereka dibingkai sebagai sosok yang dianggap bersalah, tidak profesional dan dipinggirkan. Walaupun perempuan sudah menjadi politisi, tetapi di media ia akan tetap dikonstruksikan sesuai pembagian kerja berdasarkan seksualitas. Penonjolan peran, suara, dan keberpihakan pada legislator perempuan ditunjukkan Kompas lebih pada isu-isu domestik atau “*female issue*”, isu-isu seperti ketenagakerjaan/TKI, kesehatan, perlindungan anak, pendidikan, gender, dan RUU pernikahan. Komisi yang disorot mayoritas adalah bidang-bidang yang menangani bidang domestik. Hal ini didukung dengan penggunaan cap atau label pada kosa kata yang menekankan tentang perempuan di “ruang privat”. Perempuan dipandang bertanggung jawab untuk menjaga kesehatan dan dibingkai sebagai sosok yang merawat masyarakatnya. Akhirnya, kemampuan mereka diremehkan yaitu dengan pemunculan unsur “kelalaian” atau “peremehan” pada peran legislator perempuan (Ardani, 2016: 6).

Dalam penelitiannya ia mengungkapkan bahwa pembungkaman perempuan dilanjutkan dengan penerapannya di media massa. Pembungkaman terhadap perempuan juga dilakukan melalui pola penggunaan bahasa pada Kompas yang dapat memberi kontribusi pada stereotip dan peminggiran terhadap legislator perempuan dalam isu-isu politik. Bahwa tingkat penggunaan bahasa laki-laki dan perempuan mengarah pada tingkat

ketidakadilan seksual (Ardani, 2016: 6). Efek dari bahasa ini adalah penenggelaman identitas pribadi perempuan. Pembungkaman tersebut tidak hanya dilihat melalui pola bahasa pada media tetapi melalui pembungkaman yang melanggar ideologi patriarki. Pada akhirnya legislator perempuan tidak hanya diabaikan dan dirugikan dalam ideologi patriarki tetapi juga ada kecenderungan bagi wartawan untuk dapat bersikap tidak *cover both side* dan masuk dalam “jurnalisme malas”. Artinya bahwa wartawan lebih memilih untuk kembali pada suatu stereotip untuk menjalankan fenomena (Ardani, 2016: 7).

Dalam hal ini media massa terlibat terlalu jauh dengan cara pandang terhadap perempuan yang masih melihat perempuan sebagai sosok yang diremehkan sekalipun ia sudah terjun dalam dunia politik. Media massa seharusnya memiliki fungsi yaitu membela dan mempertahankan apa yang menjadi hak dasar publik, terutama mereka yang dalam posisi tertindas. Akan tetapi walaupun kebijakan keredaksian ‘melarang’ membuat produk yang memunculkan stereotip terhadap perempuan, tetapi ketika kebijakan berdasarkan ‘kebiasaan’ memperbolehkannya. Oleh karena itu akan muncul kebiasaan-kebiasaan berulang (Hariyanto, 2009: 6).

Isu-isu tentang bias gender ini pada akhirnya tidak pernah berhenti karena konstruksi yang ditanamkan seperti pola patriarki yang menganggap bahwa laki-laki memiliki kekuasaan lebih daripada perempuan. Gender sendiri merupakan suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun

perempuan yang dikonstruksikan secara sosial maupun kultural. Misalnya bahwa perempuan itu dikenal lemah lembut, cantik, emosional, atau keibuan. Sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan, perkasa (Fakih, 2008: 8-9). Sehingga bias gender adalah anggapan yang merugikan atau menyepelekan salah satu pihak yaitu perempuan atau laki-laki misalkan perempuan memiliki sifat memelihara dan rajin sehingga tidak bisa menjadi kepala rumah tangga. Dalam wawancara dengan pemimpin redaksi, Dion Putra, ia menambahkan bahwa isu gender bukan hanya melibatkan kaum perempuan tetapi juga kaum laki-laki. Bahwa perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang sama dalam melakukan sesuatu.

Dalam hal ini untuk mengurangi bias gender di media, dibutuhkan kesadaran dari para pekerja media. Hal ini dapat dilakukan dengan menerapkan jurnalisme yang berperspektif gender yaitu dengan cara 1) para pekerja media harus memiliki kesadaran tentang gender di berbagai tingkat keredaksian 2) adanya keseimbangan di struktur organisasi dalam keredaksian untuk menyamakan pandangan antara laki-laki dan perempuan karena cara pandang antara laki-laki dan perempuan tentang suatu hal bisa berbeda berbeda (Ardani, 2016: 10).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) pada tahun 1994 tentang jumlah wartawan diketahui bahwa jumlah wartawan perempuan sangat kecil dibandingkan dengan jumlah wartawan

laki-laki. Data PWI tahun 1994 dalam Abdullah (2006: 104) menunjukkan bahwa jumlah wartawan perempuan yaitu 8,6% sedangkan jumlah wartawan laki-laki yaitu 91,6%. Hal ini disebabkan bukan karena perempuan tidak bisa menjadi jurnalis tetapi semacam ada larangan perempuan dilarang masuk. Tetapi pada kenyataannya salah seorang jurnalis perempuan yaitu Yuyu A.N. Krisna pada era 1990-an memperoleh penghargaan tertinggi Adinegoro untuk liputannya yang terkenal yaitu “Remang-remang Jakarta” (Abdullah, 2006: 105). Hal ini membuktikan bahwa perempuan juga bisa melakukan hal yang dianggap maskulin dengan kata lain bahwa profesionalisme tidak mengenal jenis kelamin entah itu pria atau wanita.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ilyas tentang studi posisi peran perempuan dalam media cetak, ia menemukan bahwa kebanyakan perempuan yang bekerja di ketiga media yaitu Mercusuar, Nuansa Pos dan Radar Sulteng bukan sebagai wartawan, editor dan redaktur. Kebijakan pemberitaan tidak terlepas dari struktur dan komposisi wartawan di dalam media cetak. Faktor komposisi ini kemudian melahirkan sistem pembagian kerja bias gender. Meski berbagai kenyataan menunjukkan bahwa perempuan wartawan sangat bisa diandalkan meliput berita-berita keras seperti perang serta bidang politik dan ekonomi tapi tetap saja bidang yang diberikan kepada perempuan adalah bidang yang lebih lunak seperti masalah sosial, pendidikan, fashion dan gaya, masalah perempuan serta anak (Ilyas, 2009: 367). Hal ini menunjukkan bahwa

pembagian kerja di media massa menunjukkan adanya bias gender yang memandang bahwa perempuan harus ditempatkan di *job desk* yang ringan. Adapun anggapan bahwa perempuan kurang memiliki kemampuan yang sama dengan laki-laki dalam hal menghasilkan sesuatu yang berdampak pada penerapan jurnalisme yang berperspektif gender.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa jurnalisme berperspektif gender harus dimiliki oleh semua media karena media merupakan sumber informasi masyarakat. Sumber informasi tersebut harus menuntun masyarakat untuk tidak bias gender. Sumber informasi yang hingga saat ini masih digunakan masyarakat adalah surat kabar. Menurut Wahyuni surat kabar itu sendiri merupakan media massa yang paling tua dibandingkan media massa lainnya. Surat kabar sebagai media massa mempunyai misi menyebarluaskan pesan-pesan pembangunan dan sebagai alat mencerdaskan bangsa (Wahyuni, 2014: 27).

Pada Surat Kabar Pos Kupang yang kemudian ditulis dalam buku berjudul Media Massa dalam Jaring Kekuasaan dijelaskan bahwa Pos Kupang dan dua media lainnya melakukan diskriminasi. Penelitian ini mengemukakan bahwa diskriminasi elit partai terhadap calon anggota legislatif perempuan. Pos Kupang melakukan hal itu melalui pembungkaman dalam teks-teks berita. Pembungkaman tersebut dilakukan melalui dua hal yaitu marginalisasi

partisipasi politik perempuan dan proses politik yang patriarki (Dosi, 2012: 195).

Dalam marginalisasi partisipasi politik ini politik perempuan tampak dalam pemberitaan perjuangan perempuan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan belum menuai hasil. Pos Kupang mencatat dua bentuk diskriminasi yaitu tidak terpenuhinya kuota 30% dan perempuan ditempatkan di nomor urut besar atau nomor urut yang tidak mungkin lolos menjadi anggota legislatif. Pos Kupang menyetir pendapat yang mempersoalkan tata cara atau prosedur yang menyebabkan tidak terpenuhinya kuota 30% dan pencantuman perempuan di nomor urut 'tak jadi'. Pos Kupang mengungkapkan suatu opini atau tuduhan yang dilontarkan kaum perempuan bahwa kaum laki-laki merasa tidak rela memberi tempat kepada perempuan dan secara substansif Pos Kupang mengatakan hal itu terjadi karena sistem patriarki yang membudaya.

Sedangkan pada proses politik yang patriarkis, Pos Kupang mengemukakan bahwa perempuan mengalami kendala dalam kuota 30%. Perempuan menyadari bahwa selain kendala prosedural yang diberlakukan dalam proses ini perempuan juga mengalami kendala internal atau dalam diri perempuan itu sendiri yaitu soal kesiapan perempuan itu sendiri. Perempuan pada akhirnya menghadapi kondisi subordinatif. Pada satu pihak ada undang-undang yang memberi peluang dengan kuota 30%. Pada pihak lain mereka menghadapi konteks sosial yang patriarkis. Konteks ini membuat perempuan tampak tidak siap dengan peluang 30%. Dengan keadaan perempuan masih

terjebak dalam berbagai hambatan seperti ekonomi, kultural, pendidikan, sosial, kesehatan yang membuat situasinya menjadi seperti lingkaran setan (Dosi, 2012: 198).

Di Kota Kupang, terdapat sebuah perusahaan media massa cetak yang paling tua yakni berdiri sejak 1 Desember 1992. Media cetak yang kemudian dikenal dengan Surat Kabar Harian Pos Kupang ini sudah berdiri selama 26 tahun. Pos Kupang salah satu surat kabar yang termasuk dalam Grup Kompas Gramedia.

Di Pos Kupang, struktur pembagian dalam keredaksian memperlihatkan bahwa jumlah antara perempuan dan laki-laki jauh berbeda, yaitu hanya terdapat 4 orang wartawan perempuan dan 3 orang redaktur perempuan. Sisanya 23 orang adalah laki-laki. Hal ini memperlihatkan bahwa di Pos Kupang, perempuan masih belum dipercayakan sepenuhnya untuk terlibat dalam keredaksian dan menempati posisi penting. Akan tetapi tidak sepenuhnya karena kepercayaan yang tidak diberikan tetapi juga karena perempuan itu sendiri yang tidak menyadari kemampuannya.

Sebagai media cetak yang sudah lama berdiri dan memiliki kepercayaan dari masyarakat Kota Kupang, peneliti ingin mengetahui bagaimana Pos Kupang dalam menerapkan praktik jurnalisme yang berperspektif gender sehingga tidak terjadi bias gender seperti beberapa penelitian di atas yang ditemukan adanya bias gender. Apakah Pos Kupang benar-benar meminimalisir bias gender sehingga menghasilkan jurnalisme

yang berperspektif gender seperti menerapkan kesadaran gender dan ada keseimbangan di dalam struktur organisasi ataukah terdapat bias gender di Pos Kupang?

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini masalah yang dirumuskan adalah:

Bagaimana Surat Kabar Harian Pos Kupang menerapkan praktik jurnalisme berperspektif gender?

1.3 Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

Mengetahui bagaimana Surat Kabar Harian Pos Kupang dalam menerapkan praktik jurnalisme berperspektif gender.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Akademis

- 1) Penelitian ini dapat berguna dalam membuka cara pandang terkait isu-isu yang disajikan oleh media khususnya isu tentang gender.

- 2) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam mengaplikasikan teori feminisme. Selain itu menjadi bahan informasi dan referensi bagi pihak yang membutuhkan.

1.4.2 Kegunaan Praktis

- 1) Kegunaan praktis bagi mahasiswa ilmu komunikasi

Penelitian ini dapat memberi motivasi bagi mahasiswa/i ilmu komunikasi untuk melakukan penelitian sejenis dan memberikan sumbangan pemikiran dalam memaknai isu tentang gender.

- 2) Kegunaan praktis bagi media

Penelitian ini dapat memberi motivasi bagi media agar lebih memperhatikan isu gender terlebih dalam menerapkan praktik membangun jurnalisme berperspektif gender.

1.5 Kerangka Pemikiran, Asumsi dan Hipotesis Penelitian

1.5.1 Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir dalam penelitian ini menggambarkan arah pemikiran dan landasan rasional dalam pelaksanaan penelitian penerapan praktik jurnalisme berperspektif gender di Pos Kupang.

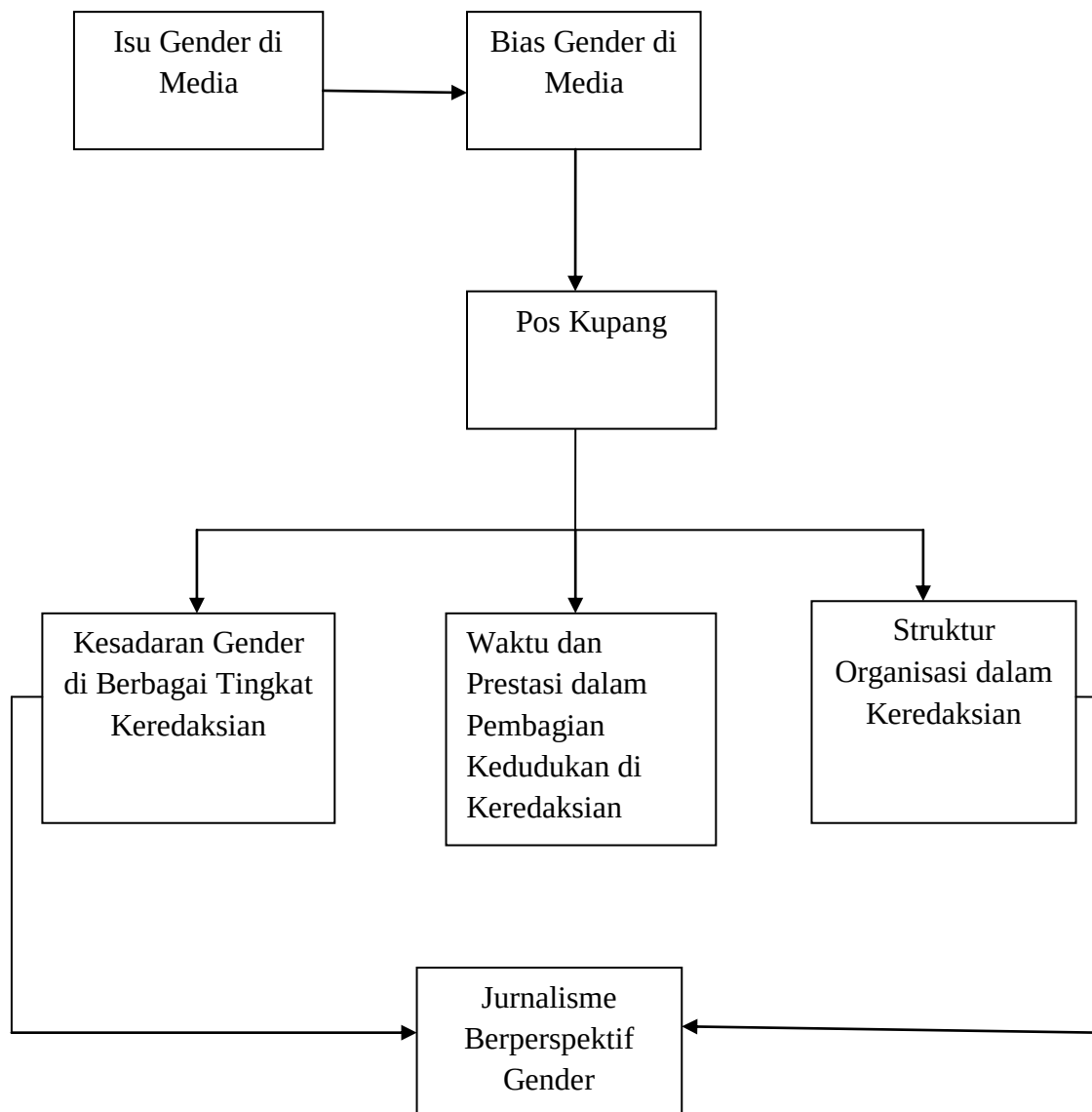
Salah satu isu yang sedang hangat di tengah masyarakat adalah isu mengenai gender. Isu dan fakta bias gender di media massa

dijadikan peneliti sebagai tolak ukur dalam mengkaji penerapan praktik jurnalisme berperspektif gender di Pos Kupang. Isu dan fakta yang dimaksud berupa segala informasi di media cetak yang melahirkan ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan. Hal itu didasarkan pada beberapa penelitian sebelumnya yang menemukan bahwa bias gender di media terjadi karena konstruksi dari media itu sendiri. Media massa memiliki peran dalam membentuk cara pandang terhadap suatu masalah salah satunya tentang gender yaitu kesetaraan antara perempuan dan laki-laki.

Peneliti menemukan beberapa kemungkinan bias gender terjadi di media cetak dalam arti lain bahwa penerapan praktik jurnalisme di media tidak begitu diperhatikan. Beberapa hal tersebut seperti kurangnya kesadaran kesadaran tentang gender di berbagai tingkat keredaksian dan struktur organisasi di media yang tidak berimbang antara laki-laki dan perempuan. Selanjutnya, dari fakta-fakta yang ada di atas peneliti tergelitik untuk mengetahui bagaimana penyebab dari ketidaksetaraan atau bias gender yang terjadi media massa. Salah satu media massa yang ingin peneliti teliti adalah Pos Kupang. Berikut bagan gambaran kerangka pemikiran peneliti yang telah dijelaskan di atas.

Bagan 1.1

Bagan Kerangka Pemikiran



1.5.2 Asumsi

Asumsi yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah bahwa cara pandang khalayak terhadap suatu isu tentang gender merupakan hasil konstruksi media terhadap realitas yang ada. Realitas yang dibentuk oleh media terhadap pandangan tentang gender terkadang bias gender atau memandang bahwa perempuan dan laki-laki tidak memiliki kemampuan yang sama dalam melakukan sesuatu atau adanya penggolongan antara laki-laki dan perempuan atau budaya patriarki yang masih begitu melekat.

1.5.3 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban atau kesimpulan sementara terhadap hasil penelitian yang akan dilakukan. Dengan kata lain, suatu jawaban yang digunakan untuk mengetahui kenyataan yang sebenarnya dari suatu hal yang belum terbukti kebenarannya (Darus, 2014: 40).

Jadi, hipotesis dalam penelitian ini bahwa Pos Kupang dalam menerapkan jurnalisme berperspektif gender dapat dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu:

1. Butuhnya kesadaran gender di berbagai tingkat keredaksian.

2. Struktur organisasi dalam keredaksian yang seimbang antara laki-laki dan perempuan.